

PENGARUH KOMPETENSI PEGAWAI TERHADAP EFEKTIVITAS PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN LAMPUNG TENGAH (STUDI KASUS PADA PEMERIKSAAN KINERJA)

Agus Ariandi

Agus.ariandi16@gmail.com

Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Metro

Abstract

From the analysis it can be concluded that there is a significant influence of Employee Competence on the Effectiveness of Supervision at the Central Lampung District Inspectorate. So, the competencies possessed by each employee have been high, resulting in effective supervision.

Keywords: employee competency, supervisory effectiveness

I. Pendahuluan

Keberhasilan dalam suatu organisasi baik besar maupun kecil bukan semata-mata ditentukan oleh sumber daya alam yang tersedia, akan tetapi banyak ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang berperan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan organisasi yang bersangkutan, (Nabila dkk, 2018: 1), oleh karena itu, sumber daya manusia merupakan salah satu unsur yang paling vital bagi organisasi. Aspek manajemen suatu organisasi diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara optimal. Selain itu pula pentingnya pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan (Nabilah, dkk, 2018: 22). Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah

adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu dengan pelaksanaan dan pembentukan aparatur pemerintahan, maka ditunjuklah inspektorat selaku badan pengawasan internal pemerintah, yang berfungsi untuk mengawasi kinerja pemerintah.

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Badan Pengawasan Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten, dan Inspektorat Kota adalah unsur pengawasan daerah yang dipimpin oleh Inspektur, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, Bupati atau Wali kota. Hakikatnya, inspektorat daerah berfungsi sebagai auditor internal pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah

dan tugas lain yang diberikan kepala daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung, pada: ayat (3) Inspektur Provinsi mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi, pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah kepada Gubernur, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Inspektorat Provinsi Lampung mempunyai fungsi sebagai berikut: a) Perencanaan program pengawasan, b) Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, c) Pembinaan dan pengendalian dan koordinasi, d) Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan, e) Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dan pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur.

Lembaga inspektorat merupakan suatu lembaga pengawas di lingkungan pemerintah daerah. Inspektorat daerah memainkan peran yang sangat penting untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah

dan perangkat daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Dalam kenyataannya, inspektorat di daerah (bahkan juga mungkin di tingkat kementerian/lembaga) belum dapat berfungsi sebagaimana diharapkan. Di banyak daerah inspektorat itu bahkan tidak maksimal. Bahkan ada yang menjadi pelarian bagi pejabat yang dimutasi dan tetap memerlukan status pejabat eselon.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Pasal 51 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyatakan bahwa (1) Pelaksanaan audit intern di lingkungan Instansi Pemerintah dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan yang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor, (2) Syarat kompetensi keahlian sebagai auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui keikutsertaan dan kelulusan program sertifikasi, (3) Kebijakan yang berkaitan dengan program sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan program pengawasan di suatu instansi pemerintah setiap pegawai dituntut untuk memiliki kompetensi yang baik dalam menjalankan amanah yang diembankan kepadanya.

Menurut Dinda (2017: 152) kompetensi adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal. Kompetensi dapat digambarkan sebagai kemampuan untuk melaksanakan satu tugas, peran atau tugas, kemampuan mengintegrasikan pengetahuan, ketrampilan-ketrampilan, sikap-sikap

dan nilai-nilai pribadi, dan kemampuan untuk membangun pengetahuan dan keterampilan yang didasarkan pada pengalaman dan pembelajaran yang dilakukan.

Untuk meningkatkan kompetensi keahlian sebagai auditor Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah melakukan pendidikan dan

pelatihan pada bagian fungsional yaitu penyusunan kertas kerja audit yang dilakukan pada tanggal 17 sampai dengan 21 September 2018 dengan diikuti peserta 10 pegawai Fungsional Auditor dan P2UPD (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah).

Tabel 1. Nama dan Jumlah Pegawai Fungsional Bersertifikat Pengawas pada Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah pada Tahun 2018

No	Nama	Gol.	Keterangan	Lembaga Pemerintah
1	Dra. Nina Susanti.	IV/b	Auditor Madya	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia
2	Drs. Ahmdad Fadli, M.M.	IV/b	Auditor Madya	
3	Ir. Ruslan Efendi, M.M.	IV/a	Auditor Madya	
4	Dra. Herlinawati .	III/d	Auditor Madya	
5	Nawawi.S.IP.	III/d	Auditor Muda	
6	Periyansah, S.H.	III/d	Auditor Muda	
7	Octaria, S.H.	III/c	Auditor Muda	
8	Heri Cahyadi, S.Sos.,M.M.	III/c	Auditor Muda	
9	Edy Saputra, S.Sos.,M.si	III/c	Auditor Muda	
10	Arieke Noptiyanto, S.H.,M.H.	III/c	Auditor Muda	
11	Budi Heriyanto, S.E.	III/d	Auditor Muda	
12	Eka Sari, S.E.	III/d	Auditor Muda	
13	Febriya S Raya, S.Sos.	III/d	Auditor Muda	
14	Feria Estikawati,S.E.,M.S .Ak.	III/c	Auditor Muda	
15	Debby Chintya Effendi, S.H.	III/b	Auditor Pertama	
16	M.Yusuf Ismail, S.Sos.	III/a	Auditor Pertama	
17	Agus Ariandi, S.Sos.	III/a	Auditor Pertama	
18	Jeri Setia Kencana, S.Sos.	III/a	Auditor Pertama	
19	Sri Nurhidayati,S.E., M.S.Ak.	III/a	Auditor Pertama	
20	Sukmiridiyanto,S.Sos.	III/a	Auditor Pertama	
21	Riska Janiarti, A.Md.	III/a	Auditor Pelaksana Lanjutan	
22	Tri Wahyono	III/a	Auditor Pelaksana	
23	Heriyudi, S.E.	III/d	Pengawas Pemerintah muda	Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik
24	Abdullah Ali, S.Sos.	III/d	Pengawas Pemerintah muda	

JURNAL SIMPLEX

Vol. 2 No. 3 Desember 2019

(ISSN xxxxxx)

No	Nama	Gol.	Keterangan	Lembaga Pemerintah
25	Yustina Tri Caturrini, S.E.	III/d	Pengawas Pemerintah muda	Indonesia
26	Partini, S.Sos.	III/d	Pengawas Pemerintah muda	
27	Nina Erfina Heryanti, S.E.	III/d	Pengawas Pemerintah muda	
28	Yani Kristianingrum, S.E.	III/c	Pengawas Pemerintah muda	
29	Windy Prana Prasetia, S.E., M.S.Ak.	III/c	Pengawas Pemerintah muda	
30	Dewi Suryani, S.E., M.M., M.S.Ak.	III/c	Pengawas Pemerintah muda	
31	Ahmad Arfero, S.E.	III/b	Pengawas Pemerintah Pertama	
32	Suwito, S.Sos.	III/a	Pengawas Pemerintah Pertama	

Sumber. Kantor Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah, 2018.

Berdasarkan Tabel 1 dapat disimpulkan bahwa terdapat 32 pegawai pengawas fungsional bersertifikat yang dikeluarkan oleh BPKP-RI dan Kemendagri-RI dan berhak untuk melakukan pengawasan. Sedangkan 42 pegawai fungsional lainnya belum berhak untuk melakukan pengawasan dikarenakan mereka belum mendapatkan sertifikat sebagai pengawas.

Tabel 2. Target dan Realisasi Program Kerja Tahunan pada Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah pada Jangka Waktu 2017-2018

No	Jenis Pengawasan	Target 100%)	Realisasi	Persen (%)
1	Audit kinerja	19	15	78,9%
2	Audit tujuan tertentu	25	35	14,0%
3	Review	15	31	20,7%
4	Pemantauan	23	10	43,47%
5	Evaluasi	5	3	60,0%
6	Pengawasan lainnya	47	32	68,08%
Jumlah		134	126	99,58 %

Sumber. Kantor Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah, 2018.

Berdasarkan Tabel 2 dapat dijelaskan bahwa dari ke 6 jenis pengawasan yang dilakukan pegawai fungsional selama ini hanya Audit tujuan tertentu, Review dan Pemantauan yang dapat mencapai

target, sedangkan Audit kinerja, Evaluasi dan Pengawasan lainnya belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa program kerja tahunan belum mencapai target yang selama ini diharapkan oleh organisasi.

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada tanggal 19 November 2018 di Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah ditemukan permasalahan dalam pengawasan yaitu berlandaskan Pasal 51 tersebut, untuk melakukan suatu pengawasan diwajibkan orang yang sudah mempunyai sertifikat, permasalahan timbul dilapangan adalah masih terdapat 42 pegawai dari 74 keseluruhan jumlah pegawai fungsional belum memiliki sertifikat pengawas yang berakibat pada kurang maksimalnya proses pengawasan yang dilakukan.

Selain itu, permasalahan pada kompetensi pegawai adalah masih adanya beberapa pegawai yang kurang memiliki kemampuan yang cukup dalam bidang yang di gelutinya, seperti tentang pemahaman tentang bahasa komputer. Kompetensi pegawai turut menentukan keberhasilan tugas yang dibebankan kepadanya. Pegawai yang memiliki kompetensi yang cukup akan meningkatkan keefektivan dalam pengawasan.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada Pengaruh Kompetensi Pegawai Terhadap Efektivitas Pengawasan Pada Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah (Studi Kasus Pada Pemeriksaan Kinerja).

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Pengaruh Kompetensi Pegawai Terhadap Efektivitas Pengawasan Pada Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah (Studi Kasus Pada Pemeriksaan Kinerja).

D. Tinjauan Pustaka

Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang tepat untuk mencapai tujuan dengan tepat dan cepat, dengan pencapaian berhasil dan ataupun gagal. Menurut Alisman (2014: 49) efektivitas adalah ukuran kualitas output itu. Ketika mengukur efisiensi, harus diketahui berapa banyak biaya yang harus ditanggung untuk mencapai suatu output tertentu. Ketika mengukur efektivitas harus diketahui apakah investasi tersebut dapat berguna. Efisiensi dan efektivitas merupakan hal penting, tetapi ketika organisasi publik mulai mengukur kinerja, seringkali hanya mengukur tingkat efisiensi saja.

Efektifitas sebagai konsep yang sangat penting dalam organisasi karena menjadi ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Menurut Setiawan (2014: 6) Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai. Efektivitas Kegiatan Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.

Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat, yang mengacu pada sebuah keberhasilan atau pencapaian tujuan yang diharapkan. Menurut Kiwang dkk (2015: 73) efektivitas adalah pencapaian target *output* yang diukur dengan cara membandingkan *output* anggaran atau seharusnya

dengan *output* realisasi atau sesungguhnya, dikatakan efektif jika *output* seharusnya lebih besar daripada *output* sesungguhnya.

Efektivitas mengarah kepada pencapaian untuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang sudah ditentukan, serta waktu. Menurut Rosalina (2012: 3) Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan apabila aktivitas yang dilakukan oleh aparat Pemerintahan daerah tidak sesuai dengan kondisi yang telah direncanakan sebelumnya, dan selain itu dilakukan tindakan korektif dari hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang direncanakan. Menurut Sami'an dan Aprilian (2013: 11) Pengawasan merupakan suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, penilaiannya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Hakekat pengawasan adalah mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, kegagalan dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Menurut Fadlan (2016: 4548) pengawasan yaitu penemuan dan

penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan.

Pengawasan merupakan proses atau langkah pencegahan dari tindakan-tindakan penyimpangan fatal dan tindakan koreksi apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan kecil yang dilakukan oleh karyawan dalam pelaksanaan kegiatan organisasi serta menjamin tujuan-tujuan organisasi dapat tercapai sesuai yang telah direncanakan sebelumnya. Menurut Glendoh (2000: 45) Pengawasan berarti para manajer berusaha untuk meyakinkan bahwa organisasi bergerak dalam arah atau jalur tujuan. Apabila salah satu bagian dalam organisasi menuju arah yang salah, para manajer berusaha untuk mencari sebabnya dan kemudian mengarahkan kembali ke jalur tujuan yang benar.

Metodologi

Penelitian ini dilakukan pada Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah tanggal 15 Maret 2019. Jenis penelitian dengan menggunakan metode deskriptif korelasional dengan pendekatan kuantitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan observasi. Jumlah populasi secara keseluruhan adalah 74 pegawai, akan tetapi penelitian ini di fokuskan pada 32 pegawai. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dan menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda.

1. Hasil Penelitian

a. Hasil Uji Normalitas

**Tabel 3 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Kompetensi Pegawai	Efektivitas Pengawasan
N		30	30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	68,67	69,07
	Std. Deviation	11,171	13,799
Most Extreme Differences	Absolute	,132	,184
	Positive	,105	,110
	Negative	-,132	-,184
Kolmogorov-Smirnov Z		,721	1,009
Asymp. Sig. (2-tailed)		,676	,261

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan tabel 3 pengawasan sebesar 0,261, menunjukkan bahwa nilai sig. pada variabel kompetensi pegawai sebesar 0,676 dan variabel efektivitas dikarenakan nilai tersebut lebih besar dari 0,05 maka dinyatakan normal.

b. Hasil Uji Homogenitas

**Tabel 4. Hasil Uji Homogenitas
One-Sample Test**

	Test Value = 0					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
Kompetensi Pegawai	33,669	29	,000	68,667	64,50	72,84
Efektivitas Pengawasan	27,415	29	,000	69,067	63,91	74,22

Berdasarkan tabel di atas pengawasan sebesar 27,415, menunjukkan bahwa nilai t pada variabel kompetensi pegawai sebesar 33,669 dan variabel efektivitas dikarenakan nilai tersebut lebih besar dari t tabel yaitu 1,99 sehingga dapat disimpulkan homogen.

c. Hasil Uji Linieritas

Tabel 5. Hasil Uji Linieritas ANOVA Table

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Efektivitas Pengawasan Kompetensi Pegawai	(Combined)	5023,700	23	218,422	2,631	,116
	Between Groups	2868,221	1	2868,221	34,545	,001
	Deviation from Linearity	2155,479	22	97,976	1,180	,453
	Within Groups	498,167	6	83,028		
	Total	5521,867	29			

Berdasarkan tabel di atas kompetensi pegawai memiliki nilai sig menunjukkan hubungan varaiebl sebesar 0,453 lebih besar dari 0,05 efektivitas pengawasan terhadap sehingga dapat disimpulkan linier.

d. Pengujian Hipotesis

Tabel 6. Hasil Hipotesis (f) ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2868,221	1	2868,221	30,264	,000 ^b
	Residual	2653,646	28	94,773		
	Total	5521,867	29			

a. Dependent Variable: Efektivitas Pengawasan

b. Predictors: (Constant), Kompetensi Pegawai

Tabel 7. Hasil Hipotesis (t) Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7,933	11,254		,705	,487
	Kompetensi Pegawai	,890	,162	,721	5,501	,000

a. Dependent Variable: Efektivitas Pengawasan

Regresi linier dilakukan untuk mengetahui hubungan fungsional atau kausal antara satu variabel independen terhadap variabel dependen. Bentuk persamaan regresi berupa $Y = 7,933 + 0,890X$. Harga 7,933 merupakan nilai konstanta (α) yang menunjukkan bahwa jika tidak ada kenaikan efektivitas pengawasan, maka kompetensi pegawai akan mencapai

7,933. Adapun harga 0,890 merupakan koefisien regresi yang menunjukkan bahwa setiap ada penambahan 1 angka untuk efektivitas pegawai, maka ada kenaikan kompetensi pegawai sebesar 0,890.

Tabel 8 Hasil Koefisien Determinasi Model Summary

Mode 1	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,721 ^a	,519	,502	9,735

a. Predictors: (Constant), Kompetensi Pegawai

Berdasarkan uji regresi linier sederhana kompetensi pegawai terhadap efektivitas pengawasan diperoleh nilai koefisien regresi $R = 0,721$ serta nilai $f = 30,264$ dengan nilai $\text{sig} = 0,000$, sehingga dari perolehan nilai tersebut hipotesis diterima. Penelitian ini mendapat sumbangan efektif $R^2 = 0,519$ atau 51,9% yang menunjukkan variabel kompetensi pegawai dipengaruhi oleh efektivitas pegawai.

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis regresi sederhana dapat diuraikan bahwa ada pengaruh Kompetensi Pegawai terhadap Efektivitas Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah. Dapat dijelaskan bahwa pegawai yang memiliki kompetensi dapat mempengaruhi efektif atau tidaknya sebuah pengawasan. Pegawai yang berkompeten dapat dilihat dari kombinasi antara keterampilan, memiliki keunggulan bersaing, citra diri yang baik serta kemampuan untuk memikirkan persoalan.

Pegawai yang memiliki kompetensi ia akan senantiasa mengasah keterampilannya agar mampu menyelesaikan pekerjaan yang terbilang sulit sekalipun, bersaing secara sehat dengan rekan kerja dan tidak menjatuhkan orang lain yang

sekantor dengannya, memiliki citra diri yang baik dan mampu menyelesaikan segala macam persoalan agar bisa mencapai target yang diharapkan organisasi. Hal semacam itulah yang telah dimiliki oleh pegawai di Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah sehingganya pengawasan yang dilakukan oleh pegawai bisa berjalan secara efektif. Efektivitas pengawasan adalah suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan yang diukur dengan indikator: Relevansi, Signifikansi, Validitas, Kepercayaan, Objektivitas, Ketepatan waktu, Daya guna.

Kesimpulan

Setelah melakukan analisis, maka peneliti dapat menarik kesimpulan dalam penelitian ini adalah ada pengaruh Kompetensi Pegawai secara signifikan Terhadap Efektivitas Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah. Jadi, kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing pegawai telah tinggi sehingga berakibat pada pengawasan yang efektif.

Daftar Pustaka

Alisman. 2014. Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Manajemen Keuangan Di Aceh Barat. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan*

JURNAL SIMPLEX

Vol. 2 No. 3 Desember 2019

(ISSN xxxxxx)

- Publik Indonesia*, Vol. 1, h. 48-54.
- Aprilda. 2012. Pengaruh Kompetensi Terhadap Prestasi Kerja Pegawai (Studi pada Bagian Pengelolaan Keuangan Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal Regional I Medan). *Jurnal Administrasi Publik, Administration Journal*, Vol. 3, h. 181-206.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fadlan. 2016. Pengawasan Dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur Jalan Kabupaten Oleh Dinas Bina Marga, Pengairan Dan Tata Ruang (Studi Kasus Di Kabupaten Paser). *eJournal Administrasi Negara*, Vol. 4, 4842-4853.
- Glendoh, Sentot Harman. 2000. Fungsi Pengawasan dalam Penyelenggaraan Manajemen Korporasi. *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan*, Vol. 2, h. 43-56.
- Kiwang, Amir Syarifudin., Pandie, David D. W., dan Gana, Frans. 2015. Analisis Kebijakan dan Efektivitas Organisasi. *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik*, Vol. 19, h. 71-84.
- Rosalina, Iga. 2012. Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Dsa Mantren Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetaan. *Publika*, Vol. 1, Vol. 1-9.
- Setiawan, Handrik. 2014. Efektivitas Kegiatan Orientasi Perpustakaan (Studi Eksplanatif Tentang Efektivitas Kegiatan Orientasi Perpustakaan Terhadap Pemanfaatan Layanan Pada Perpustakaan Universitas Airlangga Surabaya). *Journal Universitas Airlangga*, Vol. 3, h. 1-18.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah.
- Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Pasal 51 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.